GIRLS NOT BRIDES'S INTEREST IN ENDING CHILD MARRIAGE IN NIGERIA 2014-2019

Oleh: Dhea Syafira

dheasyafira16@gmail.com

Pembimbing : Dr. Tri Joko Waluyo M. Si

Bibliografi : 13 Jurnal, 10 Buku, 60 Situs, 3 Skripsi

Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru

Pekanbaru 28294 Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This study's focus is to analyze the motivation of the Girls Not Brides organization in dealing with early childhood problems in Nigeria. Child marriage is a practice that violates human rights because it causes various kinds of impacts both on the child and even the country itself. Nigeria has ratified international and regional instruments regulating children's rights, including child marriage.

This research used library research. The data sources used are primary data and secondary data from press releases and data from child marriage in Nigeria or worldwide. The data will be analyzed with descriptive analysis method. The base theory used is role theory with a pluralism perspective.

From the data analysis, it was concluded that child marriage is a practice that violates Girls' Human Rights and causes a lot of harmful impacts for the children, family, to their environment. Girls Not Bride's interest in ending child marriage is for girls to enjoy the equality of degree with boys, reach their full potential and reach the 5.3 Target of Sustainable Development Goals, which could not be achieved without ending child marriage.

Keywords: Child Marriage, Girls Not Brides, Nigeria, SDGs, and Human Rights

LATAR BELAKANG

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi sebuah kemitraan global *Girls Not Brides* dalam menangani pernikahan anak usia dini di Nigeria. Pernikahan anak usia dini didefinisikan sebagai pernikahan seorang anak yang belum berusia 18 tahun. Pernikahan anak usia dini telah menjadi pusat perhatian komunitas internasional mengingat banyaknya resiko yang ditimbulkan. Kasus pernikahan anak usia dini terjadi diseluruh penjuru dunia dengan berbagai macam latar belakang. Menikah di usia kurang dari 18 tahun merupakan realita yang harus dihadapi sebagian anak perempuan di seluruh dunia, terutama di negara berkembang. Pernikahan anak usia dini sering kali akibat ketidaksetaraan gender yang mendasar.

Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1954 secara jelas menentang pernikahan anak usia dini, namun praktek pernikahan anak usia dini masih saja banyak berlangsung di berbagai belahan dunia dan hal ini merefleksikan perlindungan hak asasi kelompok usia muda yang terabaikan.¹ Pernikahan anak usia dini termasuk sebuah kekerasan dan pemaksaan terhadap hak anak karena anak seharusnya masih bisa menikmati masa bermain dan mengejar pendidikan, tetapi dipaksa untuk menjadi dewasa untuk memikul beban dan tanggung jawab yang mana mereka belum siap secara mental, fisik, dan emosional.

Studi menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara pernikahan anak dan kelahiran anak, sebagian karena anak perempuan ditekankan untuk membuktikan kesuburan mereka setelah mereka menikah dan memiliki sedikit akses informasi tentang kesehatan dan reproduksi atau kemampuan untuk mengambil keputusan tentang keluarga berencana. Perempuan yang

mengandung diusia muda bisa menghadapi masalah kesehatan yang serius. Ibu muda mengalami tingkat kematian yang lebih tinggi serta hipertensi yang diinduksi kehamilan karena tubuh mereka tidak siap menghadapi persalinan.²

Melahirkan dan menjadi ibu dibawah umur juga dikaitkan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah dan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi.³ Kesempatan ibu muda untuk melanjutkan pendidikan dan pekerjaannya menjadi terbatas karena mereka memiliki akses yang terbatas serta bertanggung jawab mengurus anak dan pekerjaan rumah tangga.

Perempuan yang menikah diusia muda sering kali kekurangan status dan kekuasaan dalam pernikahan dan rumah tangganya, sehingga mereka lebih mungkin untuk mengalami kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, dan diasingkan dari keluarga dan masyarakat. Mereka juga percaya bahwa kekerasan itu dibenarkan.⁴

Praktek pernikahan anak usia dini paling banyak terjadi di Asia Tenggara dan Afrika. Di Asia Tenggara didapatkan data bahwa sekitar 1 juta anak usia dibawah 18 tahun telah menikah, sedangkan di Afrika sekitar 42% dari populasi anak, menikah sebelum mereka berusia 18 tahun. Secara umum pernikahan anak lebih sering terjadi pada anak perempuan dibandingkan dengan anak laki-laki, sekitar 5% anak laki-laki menikah sebelum berusia 19 tahun. Selain itu didapatkan pula bahwa perempuan tiga

¹ IHEU. UN Publishes IHEU statement: child marriage is child abuse. Diakses dari www.iheu.org. 2005

² Marthur, S., M. Greene, and A. Malhotra. 2003. Too Young to Wed: The Lives, Rights and Health of Young Married Girls. International Center for Research on Women (ICRW): Washington, D.C.

³ Singh, S., and R. Samara. 1996. Early Marriage Among Women in Developing Countries. International Family Planning Perspectives, 22(4): 148-157, 175.

⁴ Jenson, R. and R. Thornton. 2003. Early female marriage in the developing world. Gender and Development, 11(2):9-19.

kali lebih banyak menikah di usia dini daripada laki-laki.⁵

Di banyak negara, usia yang sah untuk menikah adalah 18 tahun, tetapi beberapa negara tidak menegakkan hukum ini secara kuat. Contohnya, presentase anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun di Niger adalah 77%, Chad 71%, Mali 63%, Kamerun 61%, dan Mozambik 57%. Di beberapa bagian di Ethiopia, 50% anak perempuan menikah sebelum usia 15 tahun. Bahkan pernikahan terjadi saat lahir, dalam kasus ini anak perempuan dikirim kerumah suaminya pada usia 7.⁶

Banyaknya pernikahan anak usia dini biasanya dikarenakan faktor ekonomi, pendidikan dan adat istiadat. Beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak perempuan yang sudah nikah menjadi tanggung jawab suami. Dikarenakan rendahnya pendidikan ataupun pengetahuan orang tua, anak dan juga masyarakat, hal ini menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dan tidak berpikir panjang tentang akibat dan dampak permasalahan apa yang nanti akan di hadapi. Terakhir adalah faktor adat istiadat, hal ini dikarenakan sudah menjadi tradisi turun temurun.

Seluruh negara di Afrika sedang menghadapi tantangan pernikahan anak, sebuah tradisi berbahaya yang merebut pendidikan, kesehatan dan masa depan anak perempuan. Dari sekitar 700 juta wanita yang menikah sebelum berusia 18 tahun, 125 jutanya adalah orang Afrika. Setiap tahun, 15 juta pengantin anak lainnya

⁵ IHEU. UN Publishes IHEU statement: child marriage is child abuse. Diakses dari www.iheu.org. 2005

⁶ Bruce J, Clark S. Including married adolescent in adolescent reproductive health and HIV/AIDS policy. Geneva: World Health Organization; 2003

bergabung dengan mereka - setara dengan seluruh populasi Mali atau Zimbabwe.⁷

Masyarakat Nigeria menganut sifat patriakal yang mana menjadi sifat utama bagi kebanyakan masyarakat tradisional.⁸ Masyarakat patriaki menetapkan parameter untuk posisi perempuan yang secara struktural tidak setara dalam keluarga dengan memaklumi perbedaan istilah dalam hak waris dan kedewasaan hukum, diam-diam memaafkan kekerasan rumah tangga dan seksual, dan memberikan sanksi upah berbeda untuk pekerjaan yang sama atau sebanding. Tradisi, budaya dan agama telah mengatur hubungan laki-laki dan perempuan selama berabad-abad dan dominasi laki-laki yang mengakar disegala jenis kepemimpinan struktur organisasi sosial dan institusi.⁹

Patriarki membenarkan marginalisasi kaum perempuan didalam pendidikan, ekonomi, tenaga kerja, politik, bisnis, keluarga, urusan rumah tangga, warisan dan bahkan pernikahan.¹⁰ Dalam masyarakat pedesaan yang hidup dalam perekonomian terbelakang, tradisi yang mengakar dan adat istiadat lokal memainkan peran integral dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi-tradisi ini menciptakan insentif yang kuat yang memandu kehidupan komunal dan keluarga, dan menentukan peran yang dapat dilakukan oleh perempuan dan laki-laki dalam masyarakat.¹¹ Bagi komunitas ini, kekuatan

⁷ Girls Not Brides. Ending Child Marriage in Africa: A Brief by Girls Not Brides. Diakses dari <https://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2015/02/Child-marriage-in-Africa-A-brief-by-Girls-Not-Brides.pdf> pada 2 Desember 2020

⁸ Ainna, I.O. Women, culture and society. Nigerian women and development. Ibadan Dokun Publishing House. 1998.

⁹ Makama, G. A. Patriarchy and gender inequality in Nigeria: The way forward. European Scientific Journal, vol. 9, no. 3, Oxfam. 2013.

¹⁰ Salaam, T. A brief analysis on the situation of woman in Nigeria today, DSM. 2003

¹¹ United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2003). Gender and education for all:

utama mengarah pada adat perilaku "sistem organisasi sosial patriarki"¹² yang melihat perempuan secara intrinsik lebih rendah dari laki-laki.

Dr. Jekayinfa, profesor pendidikan di Universitas Llorin Nigeria, menggambarkan sistem ini sebagai "hierarki peran yang didefinisikan oleh masyarakat untuk pria dan wanita. Warga negara Nigeria masih hidup di dunia yang didominasi oleh sistem yang mengabadikan kekuasaan laki-laki dan menyebabkan kekerasan dan pengucilan".¹³ Sebagai bagian dari konstruksi sosial yang membatasi, otoritas patriarki adalah penyebab utama ketidaksetaraan dan diskriminasi gender di Nigeria

Dasar yang menerima pernikahan dini di Nigeria adalah untuk menjaga nilai keperawanan, kekhawatiran orang tua tentang aktivitas seksual pra-nikah, untuk mengurangi pergaulan bebas dari anak perempuan mereka dan norma sosial-budaya serta agama. Namun karena sedikitnya pengertian orang tua, mereka melupakan efek yang dialami anak perempuan mereka.¹⁴

Girls Not Brides adalah sebuah kemitraan global dari lebih 300 organisasi non-pemerintah dari 50 negara berfokus pada pernikahan anak usia dini. Anggotanya

The leap to equality. Paris, Prancis: UNESCO.

Diakses dari

<http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132513e.pdf> pada 2 Desember 2020

¹² Tuwor, T. & Sossou, M.-A. Gender discrimination and education in West Africa: Strategies for maintaining girls in school. *International Journal of Inclusive Education*, 12, 363-379.

¹³ Jekayinfa, A. A. The status of the female citizens in the Nigerian socio-cultural environments: Implications for social studies education. *Nigerian Journal of Social Studies*, 10(1&2). Diakses dari <http://www.unilorin.edu.ng/publications/jekayinoluw/a/thestatus.pdf> pada 2 Desember 2020

¹⁴ Erulkar, A. The experience of married adolescent girls in northern Nigeria. The Population Council, Inc. 2007

berbasis diseluruh Afrika, Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa dan Amerika Utara bersatu dengan komitmen untuk menghentikan pernikahan anak usia dini dan agar anak perempuan bisa memenuhi kemampuan potensialnya.

KERANGKA TEORI

Pluralisme merupakan sebuah prespektif yang ada dalam hubungan internasional yang memiliki beberapa asumsi. Pertama, aktor yang bukan negara(non-negara) merupakan aktor-aktor penting dalam hubungan internasional. Dalam hal ini, ada pihak-pihak lain yang berpengaruh dalam politik dan hubungan internasional.

Kedua, negara bukanlah aktor yang selalu rasional dan yang terakhir adalah isu—isu utama yang ada di hubungan internasional bukan hanya *national security*. Fenomena pernikahan anak usia dini ini merupakan fenomena yang merampas HAM khususnya hak anak. Maka dari itu HAM merupakan pembahasan penting dalam penelitian ini. Isu HAM merupakan salah satu kajian dari prespektif pluralisme.

Tingkat analisa yang digunakan dalam penelitian ini merupakan tingkat analisa perilaku kelompok. Pada tingkat analisa ini ditekankan bahwa sebuah aksi internasional merupakan berbagai tindakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Kelompok-kelompok ini merupakan sekumpulan individu yang memiliki persamaan pemikiran dalam memandang sebuah permasalahan. Individu yang memiliki persamaan pemikiran ini tentu akan merancang sebuah kelompok yang bertujuan untuk menyalurkan berbagai pemikiran yang dimilikinya. Kelompok inilah yang kemudian berperan sebagai penggerak di dalam perkembangan hubungan internasional saat ini.¹⁵ Melalui kelompok ini masyarakat menyalurkan

¹⁵ Opcit, hal. 40

berbagai pemikiran yang dimilikinya untuk mencapai tujuan yang dikehendaki dengan lebih mudah.

Dalam skripsi ini penulis mengambil teori peran untuk menganalisis peran Girls not Brides dalam mengakhiri pernikahan anak di Nigeria.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan anak adalah pernikahan dimana salah satu atau kedua pasangan berusia dibawah 18 tahun.¹⁶ Meskipun definisi ini terdengar langsung, realitas pernikahan anak bisa menjadi rumit. Baik kata “anak” dan “pernikahan” bisa diartikan berbeda. Definisi anak yang diakui secara internasional –ditetapkan oleh Konvensi Hak Anak, salah satu perjanjian yang paling didukung secara universal dan diratifikasi secara luas dalam sejarah- adalah “setiap manusia di bawah usia 18 tahun”.

Beberapa negara dan budaya menganggap dewasa sebagai keadaan yang dicapai setelah menikah, misalnya negara di mana usia penuh berarti 18 tahun keatas, dan wanita yang sudah menikah dianggap sudah cukup usia, bahkan jika ia berusia di bawah 18 tahun. Dan negara lain memiliki usia minimum yang lebih tua untuk menikah, seperti di Nepal, di mana undang-undang mengharuskan pria dan wanita berusia minimal 20 tahun saat menikah¹⁷

Konsep pernikahan juga beragam, seperti formal atau informal, diatur oleh hukum perdata, hukum adat atau hukum agama, atau hanya menjadi praktik adat. Di

banyak belahan dunia, misalnya perkawinan dapat diakui oleh masyarakat tanpa pendaftaran resmi, hanya ditandai dengan upacara. Dan ada juga pernikahan yang hanya ditandai oleh pendaftaran resmi ke pemerintah tanpa adanya upacara semacamnya. Terlepas dari berbagai definisi, pernikahan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius yang secara langsung mengancam kehidupan, kesehatan, keselamatan dan pendidikan anak perempuan dan laki-laki, sehingga membatasi prospek masa depan mereka.

Pernikahan Anak di Nigeria

Nigeria memiliki jumlah pengantin anak terbesar di Afrika Barat dan Tengah, yaitu 40% dari semua pengantin anak di wilayah tersebut, dengan 18% menikah pada usia 15 tahun dan 43% menikah pada usia 18 tahun.¹⁸ Nigeria adalah negara terpadat di Afrika dan ekonomi terbesar yang dicirikan oleh dikotomi ekstrem, kebanyakan rakyatnya hidup dalam kekayaan ekstrem atau kemiskinan parah. Kemiskinan dan keterbelakangan diidentifikasi sebagai faktor pendorong dari praktik pernikahan anak, dan pernikahan anak dua kali lebih mungkin terjadi di daerah pedesaan dan tiga kali lebih umum diantara demografi termiskin.

Pernikahan anak perempuan dengan laki-laki dewasa masih menjadi fenomena biasa di antara kelompok etnis Hausa-Fulani yang menempati bagian utara Nigeria dan pada tingkat yang lebih rendah, lazim terjadi di bagian lain Nigeria. Di Nigeria Utara, pernikahan anak merupakan praktik budaya tradisional yang sering dipengaruhi oleh Islam.¹⁹

¹⁶UNICEF. *Child Marriage*, <https://www.unicef.org/rosa/what-we-do/child-protection/child-marriage#:~:text=Child%20Marriage%20is%20defined%20as,disproportionately%2C%20especially%20in%20South%20Asia>. Diakses pada 17 September 2020

¹⁷ UNFPA. *Child Marriage – Frequently Asked Question* <https://www.unfpa.org/child-marriage-frequently-asked-questions#what%20is%20child%20marriage> 17 September 2020

¹⁸ UNFPA, *Child Marriage in WCA - At a Glance*. Diakses dari <https://www.unicef.org/wca/media/2596/file> pada 25 september 2020

¹⁹ Tim S Braimah, *Child marriage in Northern Nigeria: Section 61 of Part I of the 1999 Constitution*

Penyebab dan Dampak Pernikahan Anak di Nigeria

Tingginya angka pernikahan anak di Nigeria sebagian besar disebabkan oleh didukungnya praktik pernikahan anak oleh Islam. Pernikahan anak didorong oleh ketidaksetaraan gender dan keyakinan bahwa anak perempuan lebih rendah daripada anak laki-laki. Di Nigeria, pernikahan anak juga didorong oleh kemiskinan. Angka kemiskinan di Nigeria mencapai 44% dan 52% di pedalaman Nigeria.

Pernikahan anak menguntungkan keluarga miskin di perdesaan. Pertunangan dengan anak perempuan di usia muda membebaskan orang tua dari biaya dan tanggung jawab membesarkan anak perempuan. Karena kemiskinan endemik di Hausa-Fulani, anak perempuan dipandang sebagai beban tambahan pada sumber daya keluarga. Alhasil, pernikahan anak perempuan digunakan sebagai strategi kelangsungan hidup keluarga.

Di Nigeria Utara perkawinan anak digunakan untuk memelihara kebajikan anak perempuan. Alasan pernikahan anak dilakukan adalah untuk memastikan keperawanan perempuan dan juga agar perempuan tidak hamil diluar nikah. Berdasarkan alasan ini, tidak jarang menemukan anak menikah pada usia 10 tahun di Nigeria Utara. Selain itu, selain alasan bahwa perkawinan anak melindungi anak perempuan dari penyakit sosial, seperti pergaulan bebas, juga dilakukan untuk menjaga kehormatan keluarga.

Meski ada alasan yang dikemukakan untuk membela pernikahan anak, namun dampaknya pada anak-anak yang menikah dini lebih besar dan tidak diragukan lagi

menjadikan pernikahan anak sebagai kejahatan sosial. Salah satu akibat yang merusak adalah meningkatnya anak perempuan yang mengalami fistula vesiko vaginal, yang merupakan saluran abnormal antara dinding vagina dan kandung kemih atau uretra. Menurut penelitian, di negara bagian Kano, 120 pasien fistula vesikovaginal dirawat dalam dua bulan. Di negara bagian utara lainnya seperti Maiduguri, terdapat 241 pasien fistula vesikovaginal dalam dua tahun, dan Jos dan Sokoto memiliki 932 kasus masing-masing dalam tujuh setengah tahun dan 31 kasus dalam satu tahun.

Selain fistula vesikovaginal, anak yang menikah dini beresiko tertular penyakit menular seksual, termasuk HIV/AIDS. Girls Not Brides juga mengungkapkan konsekuensi kesehatan lainnya dari pernikahan anak. Kemungkinan kematian bayi dari perempuan dibawah 18 tahun adalah 60% dan anak perempuan dibawah 15 tahun lima kali lebih mungkin meninggal saat melahirkan daripada perempuan yang berusia dua puluhan.

Pendidikan juga menjadi salah satu konsekuensi paling merusak dari perkawinan anak. 73% wanita di Nigeria tanpa pendidikan formal menikah sebelum usia 18 tahun, dibandingkan dengan hanya 9% yang menyelesaikan pendidikan tinggi. Pendidikan lebih lanjut hampir mustahil bagi beberapa gadis, karena tidak punya banyak pilihan selain bergantung pada suami selama sisa hidup. Pernikahan anak juga berhubungan dengan buta huruf karena banyak anak perempuan yang menikah tidak mendapatkan pendidikan dasar. Survei Demografi dan Kesehatan Nasional mengungkapkan bahwa tingkat buta huruf lebih tinggi di Nigeria Utara dibandingkan dengan negara bagian lainnya. 68% wanita di Timur Laut dan 74% wanita di Barat Laut tidak memiliki pendidikan formal dan

and the protection of children against child marriage. African Human Rights Law Journal (2014) 14 AHRLJ 474-488.
<http://www.saflii.org/za/journals/AHRLJ/2014/24.pdf>
25 september 2020

penyebab dari fakta ini adalah praktik pernikahan anak di wilayah tersebut.

Sustainable Development Goals (SDGs)

Setiap tahun 15 juta anak perempuan menikah, mempertahankan kemiskinan ketidaksetaraan dan ketidakamanan yang menopang praktik tersebut dan menjadi penghalang bagi pembangunan global. Pernikahan anak adalah masalah global yang melintasi negara, budaya, agama dan etnis. Jika tidak ada pengurangan pernikahan anak, jumlah perempuan yang menikah sebagai anak akan mencapai 1,2 miliar pada tahun 2050.

Kurangnya perhatian terhadap pernikahan anak merusak enam dari delapan *Millennium Development Goals (MDGs)* tahun 2000 hingga 2015. Sejak saat itu masyarakat internasional menyadari bahwa perkawinan anak merupakan inti dari perkembangan dan masalah hak asasi manusia, yang menghambat pencapaian banyak tujuan pembangunan lainnya.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*) menyatakan dalam Tujuan 5 yang berisikan “Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua wanita dan anak perempuan” dengan spesifik dalam Target 5.3 “Menghapus semua praktik berbahaya, seperti pernikahan anak dan pernikahan paksa, dan multilasi alat kelamin perempuan.”

Target 5.3 sangat penting dalam mengumpulkan tindakan dan memantau kemajuan dalam mengurangi pernikahan anak. Namun separuh dari *SDGs* tidak akan tercapai tanpa berkurangnya pernikahan anak, termasuk yang terkait dengan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, gizi, ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial, dan ketidaksetaraan gender. Tanpa mengakhiri pernikahan anak, 8 dari 17 tujuan *SDGs* tidak akan tercapai

Kepentingan *Girls Not Brides* Mengakhiri Pernikahan Anak di Nigeria

Adapun kepentingan *Girls Not Brides* dalam mengakhiri pernikahan anak di Nigeria adalah agar tercapainya target 5.3 *Sustainable Development Goals* yang berisi “Menghapus semua praktik berbahaya, seperti pernikahan anak dan pernikahan paksa, dan multilasi alat kelamin perempuan”. Jika target ini tidak tercapai, maka 8 target lainnya juga akan tidak tercapai karena pernikahan anak memiliki dampak lainnya terhadap kemiskinan, pendidikan, kesetaraan gender, perdamaian dan lainnya. Selain itu *Girls Not Brides* mendorong anak perempuan menikmati persamaan derajat dengan laki-laki dan mampu mencapai potensi penuh dalam dirinya.

Strategi *Girls not Brides*

Mengakhiri pernikahan anak di Nigeria membutuhkan upaya jangka panjang dan berkelanjutan. Perubahan yang akan terjadi tetap harus didukung dan didorong oleh upaya kolektif di tingkat nasional, regional maupun internasional. Sumber daya yang memadai harus tersedia untuk mendukung implementasi strategi yang efektif. menyadari bahwa pernikahan anak tidak terjadi dalam ruang hampa, upaya untuk mengakhiri perkawinan anak tidak boleh dipisahkan dari upaya pembangunan yang lebih luas dan harus menjadi bagian integral dalam mencapai tujuan pembangunan di Nigeria dan juga seluruh dunia.

- a. Memberdayakan anak perempuan dengan berbagai macam program investasi pada anak perempuan, partisipasi dan kesejahteraan mereka.
- b. Memobilisasi keluarga, komunitas dan remaja untuk mengubah sikap dan perilaku terkait pernikahan anak.
- c. Menyediakan layanan lintas sektor yang memperkuat satu sama lain dan disesuaikan dengan kebutuhan

khusus anak perempuan yang beresiko dan anak perempuan yang sudah menikah.

- d. Pembentukan dan pelaksanaan kerangka hukum yang kuat untuk mencegah pernikahan anak dan mendukung gadis yang sudah

1. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*)

Konvensi Hak Anak, atau yang sering disingkat CRC, adalah instrumen internasional pertama yang mengikat secara hukum yang menangani berbagai masalah hak asasi manusia yang berkaitan dengan anak. CRC memiliki sejumlah ketentuan yang dapat berlaku untuk perkawinan anak, seperti perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, cedera atau pelecehan, penelantaran atau perlakuan lalai, penganiayaan atau eksploitasi, termasuk pelecehan seksual.²⁰ CRC juga menetapkan bahwa anak-anak berhak atas kesehatan, pendidikan, dan perlindungan dari eksploitasi ekonomi.

Klausul penting yang dapat digunakan untuk menentang perkawinan anak adalah pasal 24 (3) CRC, yang menyatakan:

“Negara-negara Pihak harus mengambil semua tindakan yang efektif dan tepat dengan tujuan untuk menghapus praktek-praktek tradisional yang merugikan kesehatan anak.”

Mengingat praktik pernikahan anak di Hausa-Fulani adalah bagian dari tradisi dan karena praktik ini merugikan kesehatan anak, CRC merekomendasikan penghapusan undang-undang praktik tradisional seperti pernikahan anak. Namun terdapat ketentuan CRC lain yang tampaknya mendukung pernikahan anak, yaitu pasal 1 yang menyatakan

“Untuk tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia yang berusia

menikah dan ditegakkan secara efektif.

Kerangka Hukum Pernikahan Anak di Nigeria

dibawah 18 tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku bagi anak tersebut, kedewasaan dicapai lebih awal.”

CRC mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berusia dibawah 18 tahun, ketentuan ‘kecuali menurut undang-undang yang berlaku bagi anak tersebut, kedewasaan dicapai lebih awal’, bertentangan dengan hal ini dan tidak membantu untuk menghapus pernikahan anak. Di Nigeria Utara, dimana praktik tradisional dan budaya sangat dipengaruhi oleh hukum syariat Islam, usia mayoritas untuk anak perempuan dicapai sebelum pubertas. Oleh karena itu, ketentuan CRC bermasalah dalam hal tidak secara memadai menyebutkan usia seorang anak menjadi dewasa.

Pasal 14 (2) menyatakan:

“Negara-negara Pihak harus menghormati hak dan kewajiban orang tua dan wali untuk memberikan arahan kepada anak dalam menjalankan haknya dengan cara yang sesuai kapasitas yang berkembang dari anak tersebut.”

Ketentuan ini menunjukkan bahwa Nigeria, sebagai negara pihak CRC, harus menghormati hak-hak orang tua sebagai wali dan pengatur kehidupan anak-anak mereka dalam hal pendidikan, agama dan budaya. Oleh karena itu, CRC memberikan hak kepada orang tua Muslim Hausa-Fulani di Nigeria untuk mendidik putrinya mengikuti ajaran Alquran dan dapat menikah pada usia sembilan tahun karena disucikan oleh Islam.

Mengingat kekurangan CRC yang disebutkan dalam pasal 1 dan 14(2), sulit

²⁰ CRC, Artikel 19

bagi Nigeria untuk menganggap CRC sebagai kerangka hukum yang kuat untuk mencegah pernikahan anak.

2. Piagam Afrika tentang Hak dan Kesejahteraan Anak (*African Charter on the Rights and Welfare of the Child*)

Piagam Anak Afrika ditandatangani oleh Nigeria pada 13 Juli 1999, dan diratifikasi pada Juli 2001.²¹ Piagam Anak Afrika adalah instrumen yang lebih komprehensif karena berkaitan dengan banyak hak anak, termasuk pernikahan. Juga menetapkan usai anak-anak yaitu dibawah 18 tahun.²² Oleh karena itu, meskipun praktik pernikahan anak di Nigeria tidak bertentangan dengan pasal 1 CRC, namun bertentangan dengan pasal 2 Piagam Anak Afrika.

Berbeda dengan CRC, larangan pernikahan anak termasuk dalam Piagam Anak Afrika berdasarkan pasal 21(2), yang menyatakan:

“Pernikahan dan pertunangan anak perempuan dan laki-laki harus dilarang dan tindakan efektif, termasuk undang-undang, harus diambil untuk menentukan usia minimum pernikahan menjadi 18 tahun dan membuat pendaftaran semua perkawinan dalam daftar resmi wajib.”

Sejumlah artikel Piagam Anak Afrika secara khusus menangani pernikahan anak. Termasuk perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi dan pelecehan seksual. Piagam Anak Afrika juga berisi ketentuan yang mendesak negara untuk melindungi anak-anak dari bahaya sosial dan praktik budaya. Berdasarkan pasal 21 Piagam Anak Afrika, negara pihak didorong untuk:

“Mengambil semua langkah yang tepat untuk menghilangkan praktik sosial budaya yang merugikan yang

mempengaruhi kesejahteraan, martabat, pertumbuhan dan perkembangan normal anak dan khususnya: (a) kebiasaan dan praktik yang merugikan kesehatan atau kehidupan anak; dan (b) kebiasaan dan praktik yang diskriminatif terhadap anak atas dasar jenis kelamin atau status lainnya.”

Artikel ini menjelaskan penyebab pernikahan anak yaitu adat istiadat dan praktik tradisional. Dalam konteks Nigeria, Hausa-Fulani melanggar pasal 21 Piagam Anak Afrika.

3. RUU Hak Anak (*Child Rights Bill*)

Tujuan dari RUU ini adalah untuk menjinakkan CRC dan Piagam Anak Afrika ke dalam hukum Nigeria. Namun, RUU tersebut tidak dapat disahkan karena kesulitan yang dihadapi berasal dari kelompok agama dan tradisional. Pada Oktober 2002, Parlemen Nigeria menolak RUU Hak Anak dengan alasan isi RUU bertentangan dengan budaya, tradisi dan nilai-nilai Islam dari Hausa-Fulani di Nigeria Utara.²³

Keberatan utama terhadap RUU Hak Anak adalah pengaturan usia pernikahan hingga 18 tahun, yang bertentangan dengan budaya dan tradisi Hausa, di mana pernikahan biasa dilakukan untuk anak perempuan sembilan tahun. Karena RUU Hak Anak menimbulkan perdebatan antara hukum, agama dan tradisi, maka dibentuk sebuah komite untuk ‘menyelaraskan RUU anak dengan agama dan kepercayaan adat Nigeria’.²⁴

RUU Hak Anak akhirnya disahkan oleh Majelis Nasional pada bulan Juli 2003 dan mulai berlaku pada September 2003

²¹ Tim S. Braimah, Op. cit hal 476

²² Africa Children’s Charter, Artikel 2
https://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/au/afr_charter_rights_welfare_child_africa_1990.pdf 27 September 2020

²³ Tim S. Braimah, Op. cit hal 479

²⁴ Olayinka Silas Akinwumi, *Legal Impediments on the Practical Implementation of the Child Right Act 2003. 2009*. International Journal of Legal Information.
<https://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1192&context=ijli> diakses pada 28 September 2020

setelah disetujui oleh presiden Nigeria saat itu, Olesegun Obasanjo. Disahkan dengan nama *Child Rights Act* (CRA).

4. Hak Anak (*Child Rights Act*)

CRA adalah undang-undang paling lengkap yang menangani hak-hak anak di Nigeria. Pengesahan CRA menandakan niat pemerintah Nigeria untuk melindungi hak-hak anak Nigeria. CRA menetapkan bahwa kepentingan anak Nigeria harus menjadi pusat semua tindakan, dan juga mengatur tugas dan kewajiban orang tua, pemerintah dan organisasi terhadap anak.

Beberapa bagian terkait yang mengatur perlindungan anak termasuk larangan penggunaan anak dalam kegiatan kriminal, penggunaan anak dalam kerja eksploitatif, hubungan seksual yang melanggar hukum dengan anak, dan perekrutan anak-anak ke dalam angkatan bersenjata.

Sehubungan dengan pernikahan anak, Bagian III pasal 21 menyatakan:

“Tidak ada orang dibawah usia 18 tahun yang mampu melakukan pernikahan yang sah, dan oleh karena itu pernikahan yang dikontrak tersebut batal demi hukum dan tidak memiliki efek apapun.”

Begitu pula pasal 22 yang melarang petunangan anak-anak. Pelanggaran pasal 21 dan 22 sama dengan denda 500.000 Naira (setara dengan \$3,123) atau penjara selama jangka waktu lima tahun atau denda dan penjara.²⁵

Masalah utama CRA adalah berbedanya cara masing-masing negara bagian menerima hukum ini. Saat disahkan, CRA tidak secara otomatis menjadi bagian dari undang-undang 36 negara bagian Nigeria. Setiap negara bagian harus mengesahkan RUU tersebut agar bisa ditegakkan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak dan untuk mencegah pernikahan anak. Sejak di disahkan pada 2003, 12 negara bagian belum

mengadopsinya. Itu berarti anak-anak mungkin tidak memiliki hak di negara bagian yang belum memberlakukan CRA dan jika perkawinan anak dipraktikkan, itu tidak menjadi pelanggaran.

Selain negara bagian Enugu, 11 negara bagian yang belum memberlakukan CRA berada di bagian utara Nigeria dan telah mengadopsi hukum pidana yang sebagian besar berdasarkan hukum Syariah. Nigeria Utara didominasi oleh Muslim dan budaya tradisi sangat dipengaruhi oleh Islam, menolak mengesahkan CRA karena bertentangan dengan sudut pandang Islam, khususnya terkait dengan usia minimum pernikahan. Meski hukum menyatakan bahwa seseorang dibawah 18 tahun adalah anak-anak, dalam Islam tidak ada usia yang menandai masa kanak-kanak. Kedewasaan seorang anak ditentukan oleh tanda-tanda pubertas.

Selain konflik usia antara CRA dan Islam, CRA menciptakan konflik antara hak asasi manusia dengan agama. Meskipun CRA ditujukan untuk melindungi hak asasi anak, namun juga melanggar hak kebebasan berpikir, hati nurani, dan beragama sebagaimana diatur dalam pasal 38(1) dari Konstitusi 1999, yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama, termasuk kebebasan untuk mengubah agama atau kepercayaannya, dan kebebasan (baik sendiri atau dalam komunitas dengan orang lain, dan di depan umum atau secara pribadi) untuk mewujudkan dan menyebarkan agama atau kepercayaan ibadah, pengajaran, praktik dan ketaatan.”²⁶

Pernyataan diatas terdapat potensi konflik antara praktik pernikahan anak di Nigeria Utara yang bersumber dari Islam dan perlindungan anak oleh CRA yang melarang pernikahan anak. Meski

²⁵ Child Rights Act, bagian 23

²⁶ Nigeria's Constitution of 1999. https://www.constituteproject.org/constitution/Nigeria_1999.pdf 30 September 2020

pernikahan anak melanggar hak anak, argumen yang lebih kuat dapat dibuat ketika ada benturan antara hukum dan agama yang berhubungan dengan anak, kepentingan terbaik anak harus diberikan pertimbangan yang terpenting. Dalam menimbang minat anak, pertimbangan harus diberikan terkait kesejahteraan emosional, fisik dan psikologis anak. Selain itu perlindungan harus diberikan kepada anak-anak dan remaja sampai mereka cukup dewasa untuk mengambil keputusan tentang pernikahan.

Praktik pernikahan anak dalam Islam menghambat anak-anak untuk membuat keputusan independen tentang pernikahan, yang menyebabkan kerugian emosional, fisik dan psikologis anak. Oleh karena itu, jika praktik semacam itu dapat merugikan anak, maka hak kebebasan beragama menjadi terbatas.

Legalitas Pernikahan Anak di Nigeria

Setelah menyatakan alasan dan akibat perkawinan anak, perlu ditentukan apakah perkawinan anak adalah ilegal di Nigeria. Meskipun ini mungkin tampak pertanyaan yang tidak masuk akal, mengingat pemberlakuan CRA di Nigeria yang berisi bagian yang melarang pernikahan anak, ada argumen kuat yang harus dibuat bahwa pernikahan anak tidak ilegal di Nigeria berdasarkan Second Schedule Bagian 1 Butir 61 tahun 1999 Konstitusi. Bagian ini menyatakan:

“Pembentukan, pembatalan dan pembubaran perkawinan selain perkawinan menurut hukum Islam dan hukum adat termasuk sebab-sebab perkawinan yang berkaitan dengannya.”²⁷

Karena Nigeria menjalankan sistem hukum tripartit dengan hukum sipil, adat dan Islam yang beroperasi secara bersamaan, dalam kaitannya dengan pernikahan, pemerintah federal tidak memiliki kendali atas pernikahan adat dan

Islam tetapi hanya pernikahan yang dilakukan secara sipil. Artinya, menurut Bagian 1 Butir 61 dari Konstitusi 1999, ketika seseorang menikahi seorang anak di bawah hukum Islam di Nigeria Utara dan akibatnya bertentangan dengan CRA, orang tersebut tidak dapat dituntut karena pemerintah federal akan dituntut mencampuri perkawinan Islam dan akan melanggar Bagian 1 Butir 61 Konstitusi 1999. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pernikahan anak, Bagian 1 Butir 61 dari Konstitusi 1999 menjadikan CRA tidak berguna, karena Konstitusi 1999 berfungsi sebagai hukum tertinggi di Nigeria, mengesampingkan semua undang-undang lainnya.

Komitmen Nigeria dalam Mengakhiri Pernikahan Anak

Nigeria telah berkomitmen untuk menghapuskan pernikahan dini, dan pernikahan paksa pada tahun 2030 sejalan dengan target 5.3 dari Tinjauan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*). Dibawah ini adalah langkah-langkah yang telah diambil Nigeria untuk mengakhiri pernikahan anak:

1. Selama Tinjauan Nasional Sukarela di Forum Politik Tingkat Tinggi 2017, pemerintah mencatat sebagian besar negara bagian di bagian Utara telah mengelola program transfer tunai yang bertujuan untuk mengurangi angka putus sekolah anak perempuan karena pernikahan dini.²⁸
2. Nigera menandatangani pernyataan bersama Dewan Hak Asasi Manusia

²⁷ Nigeria's Constitution of 1999, Opcit

²⁸ Girls Not Brides. “Child Marriage Around The World: Nigeria,” diakses pada 1 Oktober 2020 <https://www.girlsnotbrides.org/child-marriage/nigeria/>

2015 yang menyerukan resolusi tentang pernikahan anak.²⁹

3. Nigera meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1991, yang menetapkan usia minimum anak untuk menikah yaitu 18 tahun, dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) pada tahun 1985, yang mewajibkan negara untuk memastikan kebebasan dan persetujuan penuh untuk menikah.³⁰
4. Pada 2016, Nigeria meluncurkan Kampanye Uni Afrika untuk Mengakhiri Pernikahan Anak di Afrika.³¹
5. Pada tahun 2001 Nigeria meratifikasi Piagam Afrika tentang Hak dan Kesejahteraan Anak, termasuk pasal 21 tentang larangan pernikahan anak.
6. Pada tahun 2004 Nigeria meratifikasi Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Rakyat tentang Hak Perempuan di Afrika, termasuk pasal 6 yang menetapkan usia minimum untuk menikah adalah 18 tahun.
7. Sebagai anggota Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS), Nigeria telah mengadopsi Kerangka Kerja Strategis untuk Memperkuat Perlindungan Anak Nasional dimana

perlindungan anak dari pernikahan menjadi prioritas.

8. Selama Tinjauan Berkala Universal 2013, Nigeria mendukung rekomendasi untuk menangani pernikahan anak dengan memberlakukan undang-undang yang mengklarifikasi usia legal untuk menikah.³²
9. Pada 2013, Komite Hak Anak PBB menyatakan keprihatinannya tentang tingginya angka pernikahan anak di antara anak perempuan di negara bagian Utara. Ini mendesak pemerintah untuk melakukan program peningkatan kesadaran tentang implikasi negatif pernikahan anak di antara orang tua, anggota parlemen negara bagian, dan pemimpin adat dan agama.³³

Langkah Nigeria Mengakhiri Pernikahan Anak di Tingkat Nasional

Pada tahun 2016, Kementerian Perempuan dan Pembangunan Sosial mencanangkan Strategi Nasional Pengakhiran Pernikahan anak. Visi dari strategi ini adalah mengurangi pernikahan anak hingga 40% pada tahun 2020 dan mengakhiri praktik pernikahan anak sepenuhnya pada tahun 2030.³⁴ Sebuah Kelompok Kerja Teknis untuk mengakhiri Pernikahan Anak dibentuk pada akhir 2015.

²⁹ Human Rights Watch. *Ending Child Marriage: Meeting the Global Development Goals Promise to Girls*. Diakses pada 7 Oktober 2020 dari <https://www.hrw.org/world-report/2016/country-chapters/africa?ftag=MSF0951a18>

³⁰ OHCHR, "Convention on the Rights of the Child," diakses dari <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx>

³¹ African Union. *Campaign to End Child Marriage in Africa: Call to Action*. Diakses pada 7 Oktober 2020 dari https://au.int/sites/default/files/pages/32905-file-campaign_to_end_child_marriage_in_africa_call_for_action_english.pdf

³² UN General Assembly, *National report submitted in accordance with paragraph 5 of the annex to Human Rights Council resolution 16/21* Nigeria*. Hal 2. Diakses pada 7 Oktober 2020 dari <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/160/00/PDF/G1316000.pdf?OpenElement>

³³ Ibid

³⁴ Federal Ministry of Women Affairs and Social Development. *National Strategy to End Child Marriage in Nigeria*. 2016-2020. Diakses pada 7 Oktober 2020 dari https://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2017/04/Strategy-to-end-child-marriage_for-printing_08-03-2017.pdf

Kelompok ini beranggotakan lebih dari 30 anggota, termasuk badan-badan PBB dan anggota *Girls Not Brides*, dan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, mendorong perubahan perilaku, serta memantau dan mengevaluasi undang-undang dan kebijakan.

Pada tahun 2015, negara-negara Persemakmuran (termasuk Nigeria) mengadopsi Deklarasi Kigali, yang menetapkan kerangka kerja dari Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional tentang pernikahan anak.³⁵

Pada Konferensi Perlindungan Sosial Anak perempuan yang diselenggarakan oleh ActionAid Nigeria, Emir Kano mengumumkan ia akan membawa Ulama Islam dari seluruh dunia untuk membahas masalah ini di konferensi internasional.³⁶

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pernikahan anak telah menjadi isu internasional yang patut diperhatikan karena menyangkut hak asasi anak perempuan. Beberapa penyebab pernikahan anak antara lain adalah kemiskinan, ketidaksetaraan gender, tradisi dan juga keyakinan. Kemiskinan seringkali menjadi penyebab pernikahan anak karena memungkinkan untuk mengurangi pengeluaran keluarga, dan uang mahar yang bisa dijadikan pemasukan bagi keluarga tersebut. Dalam kasus ini, di Nigeria tepatnya bagian Utara, pernikahan anak merupakan praktik budaya tradisional yang sering dipengaruhi oleh Islam.

Berbagai alasan dikemukakan untuk membela pernikahan anak, namun dampaknya pada anak-anak yang menikah

dini lebih besar dan menjadikan pernikahan anak sebagai kejahatan sosial. Dalam perspektif hak, yang paling utama adalah hilangnya masa kanak-kanak dan remaja, terbatasnya kebebasan pribadi dan kurangnya kesempatan untuk mengembangkan diri serta memengaruhi kesejahteraan fisik dan emosional, kesehatan reproduksi dan kesempatan berpendidikan.

Nigeria menandatangani dan meratifikasi instrumen internasional dan regional yang mengatur hak-hak anak termasuk pernikahan anak. Nigeria meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC), Piagam Afrika tentang Hak dan Kesejahteraan Anak (Piagam Anak Afrika), dan menggabungkan kedua instrumen tersebut menjadi hukum domestik dengan mengumumkan Undang-Undang Hak Anak (CRA) tahun 2003. Karena di beberapa negara bagian Nigeria menganut hukum Syariah, ini menadikan pemerintah federal tidak memiliki kendail atas pernikahan adat dan Islam tetapi hanya pernikahan yang dilakukan secara sipil.

Pernikahan anak termasuk dalam target 5.3 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*) yang berisikan “Menghapus semua praktik berbahaya, seperti pernikahan anak dan pernikahan paksa, dan multilasi alat kelamin.” Target ini penting dalam mengumpullan tindakan dan memantau kemajuan dalam pernikahan anak. Separuh dari *SDGs* tidak akan tercapai tanpa berkurangnya pernikahan anak, termasuk yang terkait dengan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, gizi, ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial, dan ketidaksetaraan gender. Tanpa mengakhiri pernikahan anak, 8 dari 16 tujuan *SDGs* tidak akan tercapai.

Maka dari itu *Girls Not Brides* mendorong pemerintah, komunitas global maupun regional, dan keluarga dari anak perempuan untuk mengakhiri pernikahan

³⁵ The Commonwealth. *Kigali Declaration*. Diakses pada 7 Oktober 2020 dari <https://thecommonwealth.org/sites/default/files/inline/Kigali%20Declaration.pdf>

³⁶ Action Aid Nigeria, *Conference on the Social Protection of the Girl Child*, 2016

anak. Untuk memenuhi target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030, dan untuk dunia tanpa pernikahan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Action Aid Nigeria, Conference on the Social Protection of the Girl Child, 2016

Africa Children's Charter, Artikel 2 https://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/au/afr_charter_rights_welfare_child_africa_1990.pdf 27 September 2020

African Union. Campaign to End Child Marriage in Africa: Call to Action. Diakses pada 7 Oktober 2020 dari https://au.int/sites/default/files/pages/32905-file-campaign_to_end_child_marriage_in_africa_call_for_action_-_english.pdf

Ainna, I.O. Women, culture and society. Nigerian women and development. Ibadan Dokun Publishing House. 1998.

Bruce J, Clark S. Including married adolescent in adolescent reproductive health and HIV/AIDS policy. Geneva: World Health Organization; 2003

Erulkar, A. The experience of married adolescent girls in northern Nigeria. The Population Council, Inc. 2007

Federal Ministry of Women Affairs and Social Development. National Strategy to End Child Marriage in Nigeria. 2016-2020. Diakses pada 7 Oktober 2020 dari https://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2017/04/Strategy-to-end-child-marriage_for-printing_08-03-2017.pdf

Girls Not Brides. "Child Marriage Around The World: Nigeria," diakses pada 1

Oktober 2020
<https://www.girlsnotbrides.org/child-marriage/nigeria/>

Girls Not Brides. Ending Child Marriage in Africa: A Brief by Girls Not Brides. Diakses dari <https://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2015/02/Child-marriage-in-Africa-A-brief-by-Girls-Not-Brides.pdf> pada 2 Desember 2020

Human Rights Watch. Ending Child Marriage: Meeting the Global Development Goals Promise to Girls. Diakses pada 7 Oktober 2020 dari <https://www.hrw.org/world-report/2016/country-chapters/africa?ftag=MSF0951a18>

IHEU. UN Publishes IHEU statement: child marriage is child abuse. Diakses dari www.iheu.org. 2005

Jekayinfa, A. A. The status of the female citizens in the Nigerian socio-cultural environments: Implications for social studies education. Nigerian Journal of Social Studies, 10(1&2). Diakses dari <http://www.unilorin.edu.ng/publications/jekayinoluwa/thestatus.pdf> pada 2 Desember 2020

Jenson, R. and R. Thornton. 2003. Early female marriage in the developing world. Gender and Development, 11(2):9-19.

Makama, G. A. Patriarchy and gender inequality in Nigeria: The way forward. European Scientific Journal, vol. 9, no. 3, Oxfam. 2013.

Marthur, S., M. Greene, and A. Malhotra. 2003. Too Young to Wed: The Lives, Rights and Health of Young Married Girls. International Center for

- Research on Women (ICRW): Washington, D.C.
- Nigeria's Constitution of 1999. https://www.constituteproject.org/constitution/Nigeria_1999.pdf 30 September 2020
- OHCHR, "Convention on the Rights of the Child," diakses dari <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx>
- Olayinka Silas Akinwumi, Legal Impediments on the Practical Implementation of the Child Right Act 2003. 2009. International Journal of Legal Information. <https://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1192&context=ijli> diakses pada 28 September 2020
- Salaam, T. A brief analysis on the situation of woman in Nigeria today, DSM. 2003
- Singh, S., and R. Samara. 1996. Early Marriage Among Women in Developing Countries. International Family Planning Perspectives, 22(4): 148-157, 175.
- The Commonwealth. Kigali Declaration. Diakses pada 7 Oktober 2020 dari <https://thecommonwealth.org/sites/default/files/inline/Kigali%20Declaration.pdf>
- Tim S Braimah, Child marriage in Northern Nigeria: Section 61 of Part I of the 1999 Constitution and the protection of children against child marriage. African Human Rights Law Journal (2014) 14 AHRLJ 474-488. <http://www.saflii.org/za/journals/AHRLJ/2014/24.pdf> 25 september 2020
- Tuwor, T. & Sossou, M.-A. Gender discrimination and education in West Africa: Strategies for maintaining girls in school. International Journal of Inclusive Education, 12, 363-379.
- UN General Assembly, National report submitted in accordance with paragraph 5 of the annex to Human Rights Council resolution 16/21* Nigeria. Hal 2. Diakses pada 7 Oktober 2020 dari <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/160/00/PDF/G1316000.pdf?OpenElement>
- UNFPA, Child Marriage in WCA - At a Glance. Diakses dari <https://www.unicef.org/wca/media/2596/file> pada 25 september 2020
- UNFPA. Child Marriage – Frequently Asked Question <https://www.unfpa.org/child-marriage-frequently-asked-questions#what%20is%20child%20marriage> 17 September 2020
- UNICEF. Child Marriage, <https://www.unicef.org/rosa/what-we-do/child-protection/child-marriage#:~:text=Child%20Marriage%20is%20defined%20as,disproportionately%2C%20especially%20in%20South%20Asia.> Diakses pada 17 September 2020
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2003). Gender and education for all: The leap to equality. Paris, Prancis: UNESCO. Diakses dari <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132513e.pdf> pada 2 Desember 2020